



PENETAPAN

Nomor 449/P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, Makassar 11 Mei 1994, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

XXXXXXXXXXXX, Ujung Pandang 5 Februari 1995, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut, **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 30 Juli 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Permohonan Nomor 449/P/2021/PA.Mkstertanggal 30 Juli 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II Pada hari Senin, 6 Januari 2020, di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dinikahkan oleh Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung (wali nasab) yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi yang

hlm. 1 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta mahar berupa cincin emas 3 gram;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda dan telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar Nomor 0973/AC/2019/PA.Mks tertanggal 24 April 2019;

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama; XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 8 bulan;

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I dan pemohon II;

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang Pada hari Senin, 6 Januari 2020, di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

hlm. 2 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akte Cerai atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 0973/AC/2019/PA.Mks tertanggal 24 April 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 di Wilayah Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat Shalat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II Janda;

hlm. 3 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yaitu XXXXXXXXXXXX umur 8 bulan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan yakni Buku Nikah dan untuk administrasi kependudukan serta Akta Kelahiran anaknya;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta , Tempat tinggal di Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II serta suami Pemohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 di Wilayah Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama XXXXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa cincin emas 3 gram dan seperangkat alat Shalat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II Janda;

hlm. 4 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yaitu XXXXXXXXXXXX umur 8 bulan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan yakni Buku Nikah dan untuk administrasi kependudukan serta Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Pemohon II terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan yakni untuk mengurus buku nikah dan untuk administrasi kependudukan seta Akta Kelahiran anak dan Surat penting lainnya, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud

hlm. 5 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Penetapan Sahnya Perkawinan nya, yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020, di Wilayah Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, Para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya, serta kepentingan administrasi kependudukan oleh karena itu Para Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 6 Januari 2020 di wilayah Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.4 serta kesaksian dua orang saksi masing- masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Akte Cerai atas nama XXXXXXXXXXXX, Nomor 0973/AC/2019/PA.Mks tertanggal 24 April 2019, bukti ini menunjukkan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang

hlm. 6 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada 6 Januari 2020 di wilayah Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah ayah ayah kandung Pemohon II bernama, XXXXXXXXXXXX dan yang mengawainkan adalah XXXXXXXXXXXX Imam dengan disaksikan dua saksi bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maskawin berupa cincin emas 3 gram;
- Bahwa disaat Pemohon I menikah, berstatus perjaka dan Pemohon II Janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yakni XXXXXXXXXXXX, umur 8 bulan;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Penetapan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah (untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah), dan untuk administrasi kependudukan serta Akta Kelahiran Anaknya dan untuk mengurus susrat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2020 di Wilayah Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun hlm. 7 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan administrasi kependudukan serta surat penting lainnya, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Para Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

hlm. 8 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan shighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah ayah kandung Pemohon II dan Pemohon I selaku calon mempelai lelaki yakni XXXXXXXXXXXXX, dan Pemohon II XXXXXXXXXXXXX selaku mempelai perempuan, ayah kandung yang bernama XXXXXXXXXXXXX, selaku wali karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dua orang saksi yakni XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.

Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon Pemohon II, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I yakni XXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXX selaku istri, pada tanggal 6 Januari 2020 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku

hlm. 9 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I yang bernama XXXXXXXXXXXXX, selaku suami dan dengan Pemohon II, XXXXXXXXXXXXX, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran dan administrasi kependudukan serta surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

hlm. 10 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan pemohon II (XXXXXXXXXXXX) yang Pada hari Senin, 6 Januari 2020, di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringknaya, Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

hlm. 11 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya PNPB	Rp	20.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

hlm. 12 dari 11 hlm. Pent. Nomor 449/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)